

DAFTAR PUSTAKA

- Afdaluddin, 2021. Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Tesis, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Indonesia.
- Andansari, Ekowani, Mursidi, and Muhammad Jihadi. 2022. *Business Innovation Management and Entrepreneurship The Influence of Recording, Inventorying, Reporting, and Application on The Quality of Financial Report (Case of SIMAK-BMN)*. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bimantara>.
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2021. Overview SAKTI Perspektif Pelaporan.
- Fetri Apriliana, Lelya, Palikhatun, and Payamta. 2019. 3 Business and Accounting Research (IJE BAR) Peer Reviewed-International Journal *Asset Management Based On Management Information System And Accounting Of State Property (Management Information Systems And Accounting For State Property) In The Public Service Agency (BLU) Universitas Sebelas Maret Surakarta*. <http://www.jurnal.stie-aas/ijebar>.
- George, Terry. 2009. Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta
- Hamilah, Hamilah, Amrizal Amrizal, and Simon Suban. 2022. 'The Impact of Administration, Recording, Maintenance, and Transfer of State-Owned Goods on Financial Statement Opinion With The Quality of Financial Statements as Intervening Variables (Study on 35 Work Units Within The Directorate General of Housing, Ministry of PUPR)'. *Dinasti International Journal of Management Science (DIJMS)* 3(5): 801–22. <https://doi.org/10.31933/dijms.v3i5>.
- Hamilah, Hamilah, Amrizal Amrizal, and Simon Suban. 2022. 'Analysis Of The Effectiveness Of Implementation Of State-Owned Accounting Management Information Systems (SIMAK-BMN) In The Environment Of The Agency Of Fish Quarantine, Quality Control And Safety Of Fishery Products, Ministry Of Marine And Fisheries'. *Dinasti International Journal of Management Science (DIJMS)* 3(4): 487-501. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v3i4>.
- Hidayat, Noor, and Deni Sitepu. 2015. 'Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 1(1): 5–8.
- Juwita, et al. 2017. Pengaruh Penatausahaan Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *e-Proceeding of Management: Vol.4, No.3 Desember 2017, ISSN : 2355-9357*.

- Karambut, Andrew M et al. 2019. 14 Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.*
- KPPN Kuala Tungkal (DJPB Kementerian Keuangan). 2022. Aplikasi SAKTI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti>
- Lasturi, D. H., & Sunaningsih, S. N. 2021. Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404>
- Mayasari, Dewi Nur. 2016. 'Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari'. *Jurnal Akuntansi* 1(I): 14–29.
- Niu, FAL., Kalangi, Lintje., Lambey, Linda. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Goodwill* 8(2):160-170. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842>
- Nuryati, Tutty, Bayu Pratama, and Puja Refina. 2019. 127 *Improving the Quality of Financial Reports by Implementing SIMAK-BMN in KPU-RI.* www.Liputan6.com.
- Patontongan, Daniel., Chairunisa, Frida., Sayuti, Nuraeni. 2020. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Administrasi Negara* 26(3):304-325. 10.33509/jan.v26i3.1292
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 /PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 /PRT/M/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Ramdany, and Yuni Setiawati. 2021. 10 JURNAL AKUNTANSI *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN)*. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>.
- Razak, Nurussyifa, and Juliana Nasution. 2022. 'Analisis Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAK-BMN'. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3(2): 39–41.
- Sahusilawane, Wildoms. 2020. *The Effect Of Information System and Training On The Effectiveness Of State Property Management and Accounting Information System (SIMAK-BMN)*. www.ijassjournal.com.
- Setyoko, Joko., Ardjunaidi. 2021. Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 2(2):91-97. 10.36355/jppd.v2i2.21
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sondakh, BY., Sabijono, H., Mawikere, L. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA* 5(2): 1171-1181. 10.35794/emba.v5i2.16089
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: ALfabeta.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat.
- Zulfan, H., Zaili, R and Febri, Y. 2023. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara* 15(3):400-412.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta) disusun oleh Novira Juwita Andiani, Dini Wahyu Hapsari, Muhamad Muslih (2017)	Mengetahui pengaruh penatausahaan, dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta baik secara simultan maupun secara parsial.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/ 2016 • Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
2.	<p>Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, disusun oleh Martikawati Gubali, Jantje Tinangon, Rudy Pusung (2018)</p>	<p>Mengetahui penerapan penatausahaan BMN yang dikelola Kantor Kementerian Agama sesuai dengan PMK Nomor 181 Tahun 2016 melalui aplikasi SIMAK-BMN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara • Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan unit di BMN Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan BMN, dengan persentase kesesuaian Rata-rata 73,68%.</p>
3.	<p>Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan Dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Waropen) disusun oleh Jefri</p>	<p>Mengetahui dan menganalisis pengaruh inventarisasi asset, pembukuan dan pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik pada BPKAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan Aset tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,078, inventarisasi aset berpengaruh terhadap akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi</p>

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Imbiri, Siti Rofingatun, Bill J.C Pangayow (2018)	Pemerintah Kabupaten Waropen	tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	sebesar 0,035. Pelaporan Aset Tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Publik pada
			<ul style="list-style-type: none"> Metode yang digunakan adalah Kuantitatif 	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,071. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan dengan penyajian yang terdapat di dalam laporan keuangan, disamping itu terdapat kesalahan dalam kegiatan penggolongan dan pengungkapan aset tetap serta tidak dilaksanakannya penyusutan terhadap aset.</p>
4.	Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2018 Tentang Penatausahaan Barang	Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penatausahaan BMN, khususnya pelaporan BMN di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> Teori Kebijakan Publik (Budi Winarno) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan BMN pada KLIP DJP Tahun 2017 sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan yang diamanahkan dalam kebijakan tersebut. Secara umum, adanya implementasi kebijakan yang tidak

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Milik Negara (Studi Kasus: Pelaporan Barang Milik Negara di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017), disusun oleh Ario B. dan Agustin (2019)	Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP)	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 	dijalankan atau dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan tidak mengganggu praktik dari proses pelaporan BMN KLIP DJP Tahun 2017
5.	Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, disusun oleh Dewi Nur Mayasani (2019)	Mengetahui kesesuaian atas Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005.	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari periode pembukuan tahun 2010-2012 belum sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan terdapatnya ketidaksesuaian antara pencatatan yang

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
				dilakukan dengan penyajian yang terdapat di dalam laporan keuangan.
6.	<p data-bbox="226 472 607 711"><i>Asset Management Based on Management Information System And Accounting Of State Property (Management Information Systems And Accounting For State Property) In The Public Service Agency (BLU) Universitas Sebelas Maret Surakarta</i> disusun oleh Lelya Fetri Apriliana, Palikhatun, Payamta (2019)</p>	<ul data-bbox="607 400 1010 1358" style="list-style-type: none"> • Mengetahui implementasi dari SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset; • Mengetahui keuntungan penerapan SIMAK-BMN dalam manajemen aset; • Mengetahui masalah implementasi dari SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset • Mengetahui solusi dari permasalahan implementasi SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset 	<ul data-bbox="1010 400 1413 1358" style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum • Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif 	<p data-bbox="1413 432 2110 1278">Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya aturan tentang Pengelolaan BMN belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Sebelas Maret, hal ini berdampak: pelaksanaan pengelolaan BMN belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; pengendalian pengelolaan BMN masih lemah, sehingga perlu perbaikan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pengelolaan BMN; saat ini pemangku kepentingan pengelolaan BMN lebih fokus pada pengadaan, sedangkan ruang lingkup pengelolaan lainnya masih dikesampingkan.</p>

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
7.	<i>Improving the Quality of Financial Reports by Implementing SIMAK-BMN in KPU-RI</i> disusun oleh Tutty Nuryati, Bayu Pratama, Puja Refina (2019)	Mengetahui apakah penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan SIMAK-BMN berpengaruh terhadap kualitas KPU (Sekretaris Jenderal)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.1 Tahun 2004 • PP No. 27 Tahun 2014 • Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif 	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan SIMAK-BMN berpengaruh terhadap kualitas KPU (Sekretaris Jenderal). Hasilnya menunjukkan bahwa mereka memberikan efek positif, baik secara parsial maupun simultan.
8.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara disusun oleh Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa dan Nuraeni Sayuti (2020)	Mengetahui bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • Metode yang digunakan adalah kualitatif 	Pembukuan masih menggunakan sistem manual, masih terdapat BMD yang tidak tercatat dengan baik dan seringkali pengurus barang terlambat dalam melakukan pembukuan; Inventarisasi BMD belum semuanya memiliki label kode barang. Selain itu, tidak ada daftar rekap barang dan tidak ada kartu inventaris barang pada setiap ruangan; Pelaporan yang dibuat oleh pengurus barang dalam melaporkan data BMD masih sering

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
				<p>terlambat karena kurang disiplinnya pengurus barang dalam membuat laporan; dan SDM pengurus barang masih kurang memadai sehingga menjadi salah satu kendala atau penyebab dari belum terlaksanannya penatausahaan dengan baik. Selain itu, pengurus barang tidak pernah mengikuti atau mendapatkan pelatihan terkait penatausahaan BMD. Oleh karena itu, perlu adanya kedisiplinan dari pengurus barang untuk melakukan pembukuan dengan cepat, membuat label dan kartu inventaris serta perlu adanya kegiatan pelatihan bagi pengurus barang terkait dengan penatausahaan Barang Milik Daerah.</p>
9.	Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Sekretariat	Menganalisis pengelolaan dan pelaporan aset serta	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri 	Pelaksanaan proses pengelolaan aset kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
	DPRD Provinsi Sulawesi Barat disusun oleh Afdaluddin (2021)	hambatan dalam implementasinya di Kantor Sekretariat DPRD Sulawesi Barat	Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 • Metode yang digunakan adalah Analisis kualitatif	dilaksanakan dengan cara pejabat atau pengurus barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR), membuat surat keputusan pengguna barang milik daerah, membuat berita acara pinjam pakai barang milik daerah yang ada di lingkup sekretariat DPRD, membuat rekapitulasi pajak kendaraan dan membuat atau menyusun, merencanakan kebutuhan barang milik daerah yang disebut dengan reka BMD. Faktor penghambat pengelolaan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari perencanaan dan penggunaan barang
10.	<i>Analysis Of The Effectiveness Of Implementation Of State-Owned Accounting</i>	Mengetahui pengaruh variabel penilaian, pembukuan, dan penerapan SIMAK BMN terhadap	• PMK No. 181 Tahun 2016 • PMK No. 14/KM.06/2015 • Metode yang digunakan adalah Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel penilaian, pembukuan, dan penerapan SIMAK BMN berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No.	Judul/Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori/Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p><i>Management Information Systems (SIMAK-BMN) In The Environment Of The Agency Of Fish Quarantine, Quality Control And Safety Of Fishery Products, Ministry Of Marine And Fisheries</i> disusun oleh Hamilah, et al. (2022)</p>	<p>kualitas pelaporan keuangan yang dimoderatori oleh motivasi pengguna aplikasi SIMAK BMN</p>		<p>kualitas pelaporan keuangan. Sebaliknya, motivasi pengguna aplikasi SIMAK BMN hanya mampu memoderasi penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman kerja saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan motivasi kerja</p>

Lampiran 2 Hasil Wawancara

I. Wawancara Pertama

Nama : Melky Rusera Saputra, ST., MM.
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan
 Instansi : Kementerian PUPR
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. **Siapa yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset pada Satker ini?**

Semuanya langsung di bawah Kasatker, sebenarnya kalau dilihat di SK itu ada yang namanya asisten Kasatker, nah ada itu namanya Ibu Fitri... tapi saya lebih nyuruh dia untuk mengurus rumah tangganya satker, seperti urusan pegawai dan lain-lain. Jadi semuanya di bawah kendali saya sebagai Kasatker dengan dibantu staff BMN Satker Mbak Cici.

2. **Apakah Bapak tau peraturan yang mengatur tentang penatausahaan?**

Oh...tau saya, kalau ga salah PMK 181 kan? Saya dulu tuh aslinya pernah menjabat jadi staff BMN mbak... makanya saya masih ingat

3. **Baik Pak, lalu dalam proses penatausahaan itu kan pasti ada hambatan ya Pak? Dalam Penatausahaan ini sendiri kan ada tiga proses Pak, ada Pembukuan, Inventarisasi hingga Pelaporan. Selama masa jabatan Bapak disini, Bapak menemukan hambatan apa dalam proses pelaksanaan penatausahaan itu sendiri?**

Jadi mbak, pas saya masuk itu satker wilayah II sudah ada masalah, makanya waktu itu ditunjuklah Mbak Cici yang kesini dari Balai, tapi kan itu ya mbak, balai itu terbentuknya baru dari 2019, dari yang biasanya satker bisa apa-apa sendiri, sekarang harus ke Balai.. dari Balai baru ke pusat, kendala kami salah satunya itu mbak, karena kantor kami wilayah II itu ga gabung sama Balai, kami ditugaskan Kabalai untuk menjaga kantor.. bahkan semua barang disini milik Balai mbak, kita cuma punya gedung kantor aja tapi isinya engga, jadi kalau ada apa-apa misalnya butuh laptop cepet gitu mbak, nah mintanya ke Balai dulu, proses inventarisasinya sama pencairannya ya itu jadi lebih lama mbak, terus inikan kantor kita udah lama dibangunnya, misal ada bangunan yang rusak, ya kita nunggu Balai yang perbaiki, karena uang pemeliharaan untuk gedung ini ada di anggarannya Balai.. Kita sih pengennya ya cepet ya dari proses pengajuan sampai ke proses pencairan dana nya oleh Balai.. disini kita cuma ngelapor aja ke KTU, misalnya ada yang rusak atau perlu diganti ya Balai yang urus semua karena anggarannya di dia.. tapi ya prosesnya sering lambat sih mbak, jadi kita minta kapan dikasih kapan gitu.. Saya juga jarang ketemu sama Mbak Cici,

kan walaupun dia disini tapi banyak berkantor di Balai, karena dia juga masih banyak membantu di Balai, jadi susah saya ketemu dia di kantor.

4. Lalu pak, misalnya ketika konsolidasi, ditemukan adanya kendala dalam pelaporan BMN.. Itu biasanya Mbak Cici langsung memberitahu ke Bapak atau bagaimana?

Langsung ke saya mbak, jadi Cici kasitau ke saya kalau ada kendala, tapi pertama kalau dia bisa selesaikan sendiri, dia ga ngomong.. nah kalau dia gabisa selesaikan, langsung saya suruh berangkat ke pusat. Ya itu mbak.. karena saya berasal dari administrasi juga, jadi hal-hal seperti itu gamau saya sepelekan. Tahun kemarin ada sekali masalah itu, langsung saya suruh Cici berangkat..

5. Permasalahan apa saja ya Pak kalau saya boleh tau?

Tanya aja nanti langsung sama Mbak Cici ya Mbak Farhana untuk lebih jelasnya, karena dia gabisa selesaikan sendiri, dia saya suruh berangkat ke pusat, apalagi ada aplikasi baru kan ya SAKTI itu, pokoknya kalau ada masalah, saya sistemnya langsung saya ingin selesaikan. Jadi gini mbak.. kalau saya itu pertama saya suruh mereka selesaikan, kalau gabisa saya coba bantu selesaikan, kalau gabisa juga ya saya hubungi pusat.. Saya mengabari mereka bahwa nanti staff saya akan kesana untuk menyelesaikan masalah di pelaporan, begitu mbak.. Dari dulu prinsip saya gitu, jangan pernah sepelekan masalah apapun itu.

6. Berarti koordinasi staff BMN dengan Bapak itu sudah cukup baik ya?

Sudah mbak.. tetapi balik lagi, karena Mbak Cici masih diperbantukan di Balai oleh Ibu KTU, jadi ya begitulah.. jarak dari kantor sini ke kantor Balai itu kan sangat jauh ya mbak, tapi mbak cici selalu lapor sih, baik itu via whatsapp maupun menghadap saya langsung jika ada masalah, jangan sampai jarak itu menjadi masalah.. Karena Mbak Cici sekarang satu-satunya staff di Satker, awalnya ada dua.. dengan Ibu Syamsiah, tapi karena sudah tua dan sudah tidak bisa banyak membantu, ya sekarang saya hanya mengandalkan Cici.

7. Baik Pak, mungkin selanjutnya saya izin diskusi lebih lanjut terkait Penatausahaan dengan Mbak Cici saja ya Pak?

Nah iya, langsung hubungi aja ya Mbak Cici, minta ketemu untuk diskusi..

II. Wawancara Kedua

Nama : Nursiah
 Jabatan : Staff Barang Milik Negara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
 Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan
 Instansi : Kementerian PUPR
 Jenis Kelamin : Perempuan

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. **Siapa yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset di Satker selain Mbak Cici?**

Kalau di Satker Wilayah II cuma aku aja mbak..

2. **Dalam pengelolaan aset kan ada dari perencanaan, penatausahaan sampai penghapusan, mbak hanya mengetahui sekedar aset saja atau semua proses pengelolaan Mbak Cici sudah kuasai?**

Pokoknya sampai proses pengerjaannya selesai mbak, kalau seperti hibah gitu kan udah lain lagi urusannya, itu urusan di Balai.

3. **Kembali lagi ke penatausahaan, mbak sudah tahu atau belum mengenai peraturan apa yang dipakai dalam proses penatausahaan BMN?**

Saya kurang tau jenis peraturannya mbak.. tapi yang pasti paling saya ikutin arahan pusat tentang pengelolaan BMN, misalnya tentang kontrak ini, aset ini..

4. **Untuk Penatausahaan itu sebenarnya memakai aturan PMK 181 Tahun 2016 mbak, Penatausahaan ini sendiri kan ada tiga proses, ada pembukuan, inventarisasi sama pelaporan, untuk di satker sendiri, proses pembukuannya itu bagaimana?**

Kalau yang aku lakuin ya paling itu aja e.. kalau aset BMN itu kan sesuai fisik ya? Yang akun 53151 mulai dari hm uang muka dulu kan ya, awal tender dulu lah, terus termin satu dua sampai penyelesaian lah

5. **Tapi dengan memakai aplikasi SAKTI sekarang, contohnya ada kesalahan saat input di pembukuan, itu apa masih bisa diperbaiki?**

Nah justru itu mbak, itu gabisa diperbaiki.. apalagi kalau udah disetujui.. itu yang ribet

6. **Kalau terjadi kaya gitu terus ingin diperbaiki caranya gimana itu mbak?**

Yaa di koreksi nilai aja di Mbak Welli (pusat) buat di perbaiki di aplikasinya, beda sama kemarin (sebelumnya) kan kita tinggal kasih lagi aja backup yang sudah diperbaiki ke pusat.. sekarang tuh gak bisa Mbak Hana.. sekarang kalau kita sudah input harus jelas, harus punya excell sih biar bisa dicocokin dulu, biar sesuai gitu yang kita input dengan yang dicairkan. Kalau saya sih kebanyakan koordinasinya sama eh.. apatuh.. petugas teknis yang ada di setiap PPK yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan fisik tersebut, nanti biasa kadang mereka bisa juga keliru.. Jangan sampai kaya kejadian kemarin, aku sempet ga ngecek, ternyata beda, walaupun cuma beberapa angka aja.. tapi pas dilihat beda yang di teknis sama yang saya pegang.. jadi itulah harus dicocokkan dulu

7. **Jadi yang betul itu data yang dipegang oleh staff teknis di PPK ya mbak?**

Iya, mereka kan yang tau betul mulai dari BAP nya, rinciannya, udah lengkap lah kalau di mereka, kontraknya.. kalau di kita kan di keuangan paling input, masukin, paling dilengkapi aja.. Tapi kalau di pelaporan kebetulan saya belum pernah buat itunya.. Cal-BMN nya.. jadi dibantuin sih sama Mbak Mista, jadi dikerjain sih sama dia di Balai, tapi kalau CaLK itu saya yang bikin, bahkan Wilayah I-Wilayah II saya yang bikin..

8. Tapi apa sebenarnya Mbak Cici itu tahu cara membuat Cal-BMN?

Tau.. cuma ga kepegang aja mbak sama saya, SAIBA Balai juga saya yang pegang, jadi saya minta tolong Mista aja bantu saya untuk buat Cal-BMN nya.. cuma dia kalau mau buat, harus ke saya dulu, gitu ajaa biar ga salah

9. Terus kalau untuk Inventarisasi, itu prosesnya bagaimana kalau di Satker? Atau di Balai yang pernah Mbak Cici lakukan?

Kalau inventarisasi kebanyakan di Balai.. kalau Satker cuma input doang, untuk data-data apa kelengkapan di Balai, kaya kontraknya semua copy-annya itu mereka (Balai) pegang.. kalau saya paling input kaya dari SPM gitu-gitu dari hardcopy, jadi setelah input yaudah saya simpan lagi

10. Itukan aset-aset pengerjaan, kalau aset kantor sendiri contohnya meja dengan kursi itu di Balai?

Iyaa.. di Balai semua itu punya Balai, jadi kalau rusak apa diurus sama Balai dengan lewat PPK satker masing-masing koordinasinya, misal mau beli laptop, itu langsung PPK, karena akunya akun PPK (anggaran).. Kalau Balai sih untuk umum mbak, fasilitas kantor, perbaikan atau pemeliharaan, kaya printer terus kursi-kursi sih masuk semua ke Balai, juga Wilayah I dan WilSayah II

11. Berarti kalau Pembukuan itu Satker Wilayah II sendiri, tapi kalau Inventarisasi dan Pelaporan itu gabung dengan Balai pengerjaannya ya mbak?

Iya mbak bener, jadi kalau inventarisasi itu semua Balai yang tau, misalnya ada barang yang rusak apa gimana, siapa yang pakai, gitu mbak..

12. Menurut mbak, dari masing-masing baik itu pembukuan, inventarisasi terus pelaporan, sampai sekarang ini apa yang masih menjadi hambatan dalam proses pengerjaannya begitu mbak?

Suka salah akun, kurang koordinasi begitu mbak, nanti kalau begitu kan bakal timbul masalah di akhir, terus juga kan saya cuma sendiri yang pegang, misalnya saya lagi ada halangan kaya anak sakit itu kerjaan ya jadi keteteran semua, pusat minta data jadi susah.. kerjaan juga belum selesai.. ya gitu lah mbak, tapi dengan aplikasi baru sekarang, SAKTI itu kan contohnya pajak dulu di kita kan SAIBA, nah sekarang di Bendahara, tapi ketika kita udah selesai input ya ternyata pajaknya atau pendapatan atau pengembalian belum diinput Bendahara, ya kurang koordinasi sih mbak, jadi suka miss kadang ga sama nilainya.. soalnya Bendahara tuh lupa kalau sekarang dia yang input, dulu soalnya kita terus kan yang input di SAIBA.. Lalu juga apa namanya itu di pembuat komitmen atau kalau dulu tuh namanya SAS kan ada tiga staff baru, mereka kadang suka salah masukin akun, jadi di SAKTI itu muncul ketidaksesuaian data, jadi kaya yang harusnya aset, malah masuk ke persediaan.. Makanya kemarin itu kita sampai diundang sama KPPN Makassar dan Pusat juga hadir, kalau berikutnya jangan sampai ada masalah ini lagi, ya kalau petugasnya baru

mau gimana? Kurangnya susah koordinasi ke kita dulu, harusnya petugas komitmennya sebelum input itu harus nanya kita dulu, masuk akun mana gitu karena kalau engga, mereka sering salah.. karena kalau salah kan kasihan Pusat ngebantu kita buat nyelesain..

13. Jadi menurut Mbak Cici, terlebih sejak memakai aplikasi SAKTI itu masih terdapat kendala ya mbak?

Iya mbak.. kami harus lebih berhati-hati saat menginput karena beda dengan aplikasi dulu tuh kan masih dipisah SAIBA dan SIMAK nya.. sekarang sebenarnya enak juga sih jadi semua serba satu aplikasi, kita juga sempet dapet pelatihan sekali cuma yaaaa itu masih kagok aku sama aplikasi baru, yang lain juga gitu sih mbak di Balai, jadi masih banyak lah kendalanya bagi aku..

III. Wawancara Ketiga

Nama : Mista
 Jabatan : Staff Barang Milik Negara Balai Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan
 Instansi : Kementerian PUPR
 Jenis Kelamin : Perempuan

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Mbak Mista ini yang bertugas membuat laporan Cal-BMN nya Sakter Wilayah II ya?

Iya mbak betul, saya yang buat

2. Selain mbak membuat laporan Cal-BMN Sakter Wilayah II, Mbak Mista bantu bagian apalagi yang terkait dengan BMN di Satker? Mungkin bagian pencatatan atau lain sebagainya begitu?

Kalau saya mbak, itu Cal-BMN sama proses hibahnya aja, kalau pencatatan di aplikasinya itu Mbak Cici..

3. Oh baik mbak, tapi suka ada permasalahan ga ya mbak dalam menyusun Cal-BMN? Khususnya yang berhubungan dengan pencatatan, misalnya laporan neraca di Satker Wilayah II?

Mungkin ada salah input di aplikasi mbak

4. Kalau salah input gitu berarti urusannya Mbak Cici ya mbak?

Iya mbak..

5. Berarti kalau yang dilaporkan di Cal-BMN itu semuanya sudah sesuai ya mbak? Karena udah hasil dari ralat di konsolidasi begitu ya?

Iya mbak betul..

Lampiran 3 Dokumentasi

